

Dinamika Partai Nahdlatul Ulama dalam Konstelasi Politik di Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955

Ahmad Faiz Rofi'i

Program Studi Pendidikan Sejarah
STKIP Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu
E-mail: ahmadfaizrofii@stkipadhaku.ac.id

Abstract

Nahdlatul Ulama is an Islamic organization called jam'iyah founded by traditional ulama in Surabaya in 1926. During its development, NU had implemented organizational development by establishing NU branches throughout Indonesia, one of which was Cirebon succeeding in holding the 6th Congress in 1931. NU's existence in Cirebon livened up the organization exchange in this area because in the previous years religious organizations such as SI and PUI had existed. At its inception, NU only focused on religion and education, but in its development, NU has participated in national political movements. The aim of this research is to describe the history and development of the NU branch of the Cirebon Regency. Methods conducted in this research are historical methods, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography. The results of this study reveal that a number of important facts that the presence of the local kiai determines the extent to which NU can develop and even become the main actor in NU's victory in the 1955 elections in Cirebon Regency as the winning party and the only branch in West Java that won the most votes.

Kata Kunci: Cirebon, Nahdlatul Ulama, Islamic party

Pendahuluan

Melacak jejak sejarah eksistensi Nahdlatul Ulama (NU), dapat diketahui bahwa NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini tidak hanya berkembang di Jawa Timur dan Jawa Tengah saja. Di Cirebon Jawa Barat misalnya, NU berdiri secara resmi pada tahun 1931 pasca perhelatan Kongres NU ke-6 di Hotel *Orange* Cirebon. Keberadaan lembaga pendidikan Islam pesantren merupakan salah satu faktor berkembangnya NU di Cirebon. Sebagaimana Pijfer menyebut Cirebon sebagai pusat pesantren tradisional kaum bumi putera di Jawa Barat sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20.¹ Selain itu, sejarah awal NU di Cirebon tidak lepas dari kehadiran kiai yang memiliki hubungan tradisi keilmuan pesantren antara kiai-kiai Cirebon dan Jawa Timur.²

¹ G.F. Pijfer, *Fragmenta Islamica: Beberapa Studi Mengenal Islam Di Indonesia Awal XIX*, ed. Tudjimah Tudjimah (Jakarta: UI Press, 1987), 80–81.

² Nina Herlina Lubis, *Sejarah Perkembangan Islam Di Jawa Barat* (Bandung: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2011), 280.

Selain tradisi keilmuan pesantren, reaksi defensif terhadap aktivitas kelompok Islam Modernis juga merupakan faktor lain NU hadir di Cirebon, antara lain Sarekat Islam (SI). Menurut Kover, anggota SI Cirebon terbanyak ketiga berjumlah 40.000 pada tahun 1913 setelah Batavia dan Surakarta.³ Selang beberapa tahun, Persatuan Umat Islam (PUI) yang diinisiasi Kiai Abdul Halim Majalengka berhasil mendirikan madrasah *Persatoean Oemmat (PO)* pada 1926 di Lemahwungkuk.⁴ Sedangkan gerakan pemurnian Islam yang di usung Muhammadiyah telah masuk ke Cirebon pada tahun 1937 oleh Kiai Toyib.⁵ Bursa keormasan di daerah ini sangat memungkinkan NU terseret dalam lingkaran konflik terutama terkait perbedaan paham keagamaan antara Islam tradisional dan Islam modernis.

Selanjutnya, melalui keputusan Muktamar NU ke-19 di Palembang tahun 1952, NU merubah statusnya dari organisasi keagamaan menjadi partai politik. Tiga tahun kemudian NU ikut serta pada pemilu 1955. Partai NU Kabupaten Cirebon meraih hasil gemilang keluar sebagai pemenang dan menjadi cabang satu-satunya di Jawa Barat yang meraih kemenangan. Keberhasilan itu tidak lepas dari strategi kampanye NU dengan menghadirkan kiai-kiai pedesaan dan pesantren yang berafiliasi dengan NU.⁶

Berangkat dari uraian di atas, tulisan ini berusaha mengungkap sejumlah fakta mengenai kemunculan NU di Cirebon, bursa keormasan di daerah ini hingga turut serta dalam pemilu 1955. Pasalnya organisasi dan partai di Cirebon ada yang menawarkan ide pembaharuan maupun gagasan pelestarian tradisi keagamaan di masyarakat. Perbedaan paham keagamaan, orientasi gerakan dan kultur organisasi memungkinkan NU diserang oleh organisasi Islam dan partai lain yang bersebrangan pemikiran. Oleh karena itu, NU sebagai organisasi pendatang di Cirebon yang bergerak dalam bidang keagamaan juga politik, keberadaanya tentu terseret dalam lingkaran konflik bersama organisasi-organisasi yang ada bahkan ajang merebutkan suara umat Islam pada pemilu 1955. Untuk menfokuskan pembahasan, maka lingkup temporal dalam tulisan ini adalah tahun 1952 sampai tahun 1955. Tahun 1952 sebagai batas awal dengan alasan bahwa pada tahun ini NU menjadi partai politik melalui keputusan Muktamar NU ke-19 di Palembang.

³ Imas Emalia, "Dinamika Gerakan Sarekat Islam (SI) Cirebon Dalam Kongres Al- Islam I 1922," *Buletin Al-Turas* 14, no. 1 (2008): 57-74, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-turats/article/view/4256>.

⁴ Imas Emalia, "Penghulu Dan Kyai Di Karesidenan Cirebon: Semangat Keberagaman Dan Berpolitik Pada Awal Abad Ke-20," *Jurnal Al-Turats* 12, no. 2 (2006).

⁵ Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, "Jejak Muhammadiyah Cirebon 2: Dari Garut Menyebarkan Ke Cirebon," *Aktualita No. 3* (Cirebon, 2012), 31.

⁶ Ahmad Faiz Rofi'i, Yety Rochwulaningsih, and Alamsyah Alamsyah, "Political Strategy of Nahdlatul Ulama Party in Cirebon Regency during 1952-1967," *Indonesian Historical Studies* 6, no. 1 (2022): 78-93, <https://doi.org/10.14710/ihis.v6i1.13267>.

Tahun 1955 dipilih sebagai batas akhir karena pada tahun ini NU ikut serta pada pemilu 1955. Sementara untuk lingkup spasial adalah Kabupaten Cirebon dengan alasan daerah ini perintis dan berkembangnya NU di Jawa Barat melalui keberadaan pesantren-pesantren terkemuka dan merupakan pembahasan sejarah lokal yang menarik, karena setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri ditinjau dari sudut ruang dan waktu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah bertujuan untuk merekonstruksi kejadian masa lampau secara sistematis, objektif dan kritis berdasarkan sumber-sumber sejarah dengan menggunakan empat tahapan yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menggunakan sumber Inventaris Arsip Tekstual NU 1948-1979 yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Peneliti juga menggunakan sumber-sumber berupa majalah dan surat kabar yang sezaman tersimpan di Perpustakaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) antara lain, *Majallah Berita Nahdlatul Ulama*, *Majallah Soera Nahdlatul Ulama*, *Majallah Al-Mawaidz*, *Majallah Al-Lisaan*. Selain itu, menggunakan sumber dokumen dan audio visual yang tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota dan Kabupaten Cirebon yang memuat dokumentasi sekitar pemilu 1955 di Cirebon. Sumber-sumber yang diperoleh kemudian dikritik secara internal, eksternal, ditafsirkan dan dianalisis kemudian disusun menjadi serangkaian cerita yang utuh dan kronologis menjadi sebuah karya historiografi.

Hasil dan Pembahasan

A. Melacak Akar Historis NU Cabang Cirebon

1. NU Cabang Cirebon sebelum Tahun 1952

NU adalah organisasi keagamaan yang bentuk oleh para kiai pesantren tradisional didirikan di kampung Kertopaten, Surabaya 16 Rajab 1334 H, bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926. Pada periode 1926-1940, NU giat melakukan ekspansi organisasi ke berbagai daerah terutama di Cirebon. Cirebon adalah daerah perintis dan berkembangnya NU di Jawa Barat. Tradisi keilmuan pesantren menjadi faktor utama penyebaran NU di Cirebon karena memiliki hubungan dekat dengan beberapa tokoh NU seperti Kiai Kholil Bangkalan Madura, KH. Hasyim Asy'ari, dan KH. Wahab Hasbullah. Dengan demikian ketika NU dideklarasikan, secara otomatis kiai-kiai di Cirebon dengan sendirinya mengikuti, antara lain KH. Amin Sepuh Ciwaringin. Ia adalah santri Kiai Kholil dan salah satu gurunya selama di Bangkalan yaitu KH. Hasyim Asy'ari.

Sementara KH. Hasyim Asy'ari mempunyai menantu KH. Idris Kamali Kempek dan beberapa santrinya adalah KH. Solihin Ciwaringin, KH. Abdullah Syatori Arjawanangun dan KH. Muhammad Abbas Abdul Jamil Buntet.⁷

KH. Muhammad Abbas Abdul Jamil Buntet adalah santri angkatan pertama KH. Hasyim Asy'ari bersama KH. Wahab Hasbullah pada tahun 1899. Dukungan Kiai Abbas kepada NU terlihat dengan berdirinya *Madrasah Abnoul Wathan* pada 1928 sebagai representasi *Nahdlatul Wathan* dan *Taswirul Afkar*.⁸ Keikutsertaan Kiai Abbas di NU dapat ditelusuri melalui perhelatan Kongres NU antara lain tercatat sebagai utusan *rois syuriah* cabang NU Cirebon pada Kongres ke-4 di Semarang 1929,⁹ ke-13 di Menes Banten, ke-14 di Magelang dan Kongres NU ke-15 di Surabaya 1940.¹⁰ Kiai Abbas dikenal sebagai pejuang revolusi kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya 1945. Sebelum lahirnya fatwa Resolusi Jihad, ia menghadiri pertemuan Konsul Ulama Se-Jawa dan Madura pada 21-22 Oktober 1945. Kemudian terlibat langsung dalam pertempuran Surabaya dengan mengatur langkah-langkah taktis guna menghadapi sekutu yang berada di Surabaya seperti mempersiapkan pasukan *Hizbullah* dan *Sabilillah* di Pondok Buntet Cirebon.¹¹

Tokoh selanjutnya, KH. Abdul Halim Leuwi-munding. Ia adalah kerabat dekat KH. Wahab Hasbullah saat di Makkah. Sebelum NU terbentuk, KH. Abdul Halim adalah satu-satunya utusan dari Jawa Barat yang menghadiri proses pembentukan NU di Surabaya tahun 1926. Setelah terbentuk ia diangkat sebagai *khatib tsani* atau Sekretaris Kedua di struktural NU. KH. Abdul Halim juga dikenal sebagai pelopor di bidang ekonomi NU dengan mendirikan *Coperatie Kaoem Moeslimin* (CKM) tahun 1929.¹² Bergabungnya KH. Abdul Halim dengan NU dan berdirinya Madrasah oleh Kiai Abbas menandakan bahwa pada tahun 1926-1928, NU Cirebon diperkirakan sudah menyebar dan berdiri namun belum secara resmi.

Dengan demikian, untuk mengenalkan NU secara resmi diberbagai daerah terutama Cirebon maka melalui keputusan Kongres NU ke-3 di Surabaya tahun 1928 dibentuklah *Lajnah Nashihin* (Komisi Propaganda). Tujuannya guna

⁷ Budi Sujati, *Sejarah Nahdlatul Ulama Jawa Barat* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 157-62.

⁸ Ahmad Zaini Hasan, *Perlawanan Dari Tanah Pengasingan: Kiai Abbas Pesantren Buntet Dan Bela Negara* (Yogyakarta: Lkis, 2014), 80-81.

⁹ "Catatan Singkat Kongres N.O. Ke-4 Di Semarang 1929 Dalam Berita LINO No. 6 Awal Juli," 1971.

¹⁰ "Verslag Congres N.O. Jang Ke-XIII Di Kota Menes Banten, 11/12-16/17 Juni 1938.144," n.d.; "Verslag Congres N.O. Jang Ke-14 Di Kota Magelang, 1/2-6/7 1939.7.," n.d.; "Verslag Congres N.O. Jang Ke-15 Di Kota Surabaya, 9 Februari 1940.14," n.d.

¹¹ Ahmad Zaini. Hasan, *Perlawanan Dari Tanah Pengasingan: Kiai Abbas, Pesantren Buntet Dan Bela Negara*. (Yogyakarta: Lkis, 2014), 91-92.

¹² Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: PT. Duta Aksara Mulia, 2010), 92.

menyebarkan NU ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Madura. Dalam hal ini KH. Bisri Syansuri, KH. Wahab Hasbullah, dan KH. Abdul Halim Leuwimunding bertugas ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat.¹³ Sementara di Cirebon, melalui para tokoh di atas berhasil menyelenggarakan Kongres NU ke-6 (*Congres Kaping Nenem*) pada tahun 1931 bertepatan pada 10-12 *Rabius Tsani* 1350 H/ 25-27 Agustus 1931 M. Kongres tersebut berlangsung tiga hari di dua tempat berbeda. Pertama di Hotel *Orange* Cirebon pada 10-11 *Rabius Tsani* 1350 H/ 25-26 Agustus 1931 M dan kedua pada 12 *Rabius Tsani* 1350 H/ 26 Agustus 1931 M di Buntet Pesantren.¹⁴

Terkait gambaran awal susunan pengurus NU Cabang Cirebon belum ditemui secara pasti. Saat itu HBNO (*Hofft Bestur Nadlatoel Oelama*/Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) melalui *Lajnah Nasihin* hanya menargetkan daerah-daerah di Pulau Jawa terutama Cirebon untuk segera mendirikan cabang secara resmi. Sebelum Kongres diadakan sebenarnya NU cabang Cirebon sudah terbentuk. Hal ini berdasarkan berita "*Congres Kaping Nenem*" bahwa Hadjie Moehammad Koerdi mendapat surat untuk ditugaskan sebagai pimpinan Kongres dan saat itu kantor NU cabang Cirebon berlokasi di Jalan Kebon Tjaistraat No. 51 Cheribon.¹⁵ Selain itu, pasca Kongres, khusus *Kring* NU Babakan terdapat informasi melalui "*Madjallah Berita Nahdlatoel Oelama*" terbit pada 1 Syawal 1356 H/5 Desember 1937 No. 3 tahun ke-7 memberitakan, *Kring* NU Babakan telah melaksanakan pergantian kepengurusan yang terdiri Kiai Abdoel Mughni sebagai *rois syuriah*, Ibrahim Badjoeri sebagai Wakil *rois syuriah*, Kiai Abdoel Khadir selaku *katib awwal*, Semaoen, Kiai Machboeb sebagai *katib tsani*. Kemudian *tandiziyah* dijabat oleh Kiai Badjoeri, dan Sekretarisnya M. Arsyad.¹⁶

Aktivitas awal NU Cirebon dapat ditelusuri melalui perhelatan Kongres PBNU yang dihadiri pengurus NU Cirebon, diantaranya pada Kongres NU ke-4 di Semarang 1929, Kongres NU ke-11 Banjarmasin 1936, Kongres NU ke-12 di Malang 1937. Selanjutnya, Kongres NU ke-13 di Menes Banten 1938, Kongres NU ke-14 di Magelang 1939, Kongres NU ke-15 di Surabaya 1940.¹⁷

¹³ Anam, 86.

¹⁴ "Pemberitahuan Muktamar N.O Ke-VI," n.d.; "Catatan Singkat Tentang Muktamar N.O Ke-6," n.d.; "No. 8 Dan 9 Tahun Ke-3," *Madjallah Swara N.O.*, n.d.

¹⁵ Asumsi sementara bahwa pada tahun 1928-1930-an NU cabang Kabupaten dan Kota belum terbagi, masih dalam status yang sama yaitu cabang NU Cirebon. Lihat: "Pemberitahuan Muktamar N.O Ke-VI"; "Catatan Singkat Tentang Muktamar N.O Ke-6."

¹⁶ *Madjallah Berita Nahdlatoel Oelama* 1 Syawal 1356 H/5 Desember 1937 No. 3 tahun ke-7.

¹⁷ Catatan Singkat Kongres N.O Ke-4 di Semarang 1929 dalam berita LINO No. 6/awal Juli 1971. Verslag Congres N.O. jang ke-XIII di Kota Menes Banten, 11/12-16/17 Juni 1938.144. Verslag Congres N.O. jang ke-14 di Kota Magelang, 1/2-6/7 1939.7. Verslag Congres N.O. jang ke-15 di Kota Surabaya, 9 Februari 1940.14.

Keberadaan NU di Cirebon semakin meramaikan bursa keormasan di daerah ini sehingga seringkali dianggap kawan maupun lawan. Seperti yang disebutkan Pijfer bahwa pada awal abad ke-20 di Cirebon, organisasi Islam seperti SI, PUI, Al-Irsyad dan NU berlomba-lomba mendirikan cabang untuk menarik masyarakat agar mengikuti organisasi-organisasi tersebut. Kemudian aktivitas organisasi tersebut seringkali muncul perdebatan seputar *khilafiyah* (perbedaan) antara kiai tradisional NU dengan Islam puritan. Hal itu tercatat dalam *Verslag Ringkes Madjallah Tjahya Islam* tahun 1932 yang memuat debat terbuka pertama diselenggarakan di Ciledug dengan sebutan “*Openbare Debat Vergadering Kiai Nahdlatoel Oelama Tjirebon Contra Kiai Modern*”. Saat itu, pihak NU diwakili oleh KH. Abdul Khair, sementara pihak Islam modernis diwakili oleh KH. Muhammad Anwar Sanusi dari *Majlis Ahli Sunnah Cilame* (MASC).¹⁸ Perdebatan itu tidak hanya di satu tempat saja melainkan terus berlangsung di Karang Sembung tahun 1934 dan di Madrasah Al-Irsyad Gebang tahun 1936 bahkan skala nasional seperti di Majalengka, Sumedang, Bandung, Tasikmalaya, Batavia (Jakarta) dan daerah lainnya.¹⁹

Setelah debat terbuka diadakan, bagi NU ini adalah salah satu upaya pengenalan organisasi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat Cirebon dengan sendirinya mengikuti karena NU dianggap luwes dalam menentukan berbagai hukum ajaran Islam yang saat itu masih kental dengan budaya, tradisi masyarakat sekitar antara lain *talqin* (membimbing orang yang hendak meninggal dengan mengucapkan syahadat), *tahlil* dan lain sebagainya. Maka tidak heran sebagaimana Pijfer menyebut bahwa keberadaan kiai yang memiliki pesantren di Cirebon dan berafiliasi dengan NU pengaruhnya sangat kuat. Sehingga pada periode 1934-1940-an, *kring* (*Ranting/Majelis Wakil Tjabang*) di Cirebon sudah tersebar di beberapa tempat antara lain Karang Sembung, Sindang Laut, Plered, Kejaksan, Karang Suwung, Babakan dan Gebang.²⁰

Pada masa Revolusi Fisik (1946-1948), keterlibatan orang-orang NU di Wilayah III Cirebon dapat ditelusuri melalui keaktifan laskar *Hizbullah* yang dimotori Kiai Abbas. Kiai Abbas mengangkat KH. Hasyim Anwar sebagai Komandan *Hizbullah*. Laskar *Hizbullah* Cirebon terdiri dari tiga pasukan. Pertama, Batalyon 4 dipimpin oleh Danu bermarkas di Indramayu, Batalyon 5 dipimpin Kiai Abdullah Abbas bermarkas di Mundu. Ia kemudian diangkat

¹⁸ Madjallah Tjahya Islam, *Verslag Ringkes Openbare Debat Vergadering Kiai Nahdlatoel Oelama Tjirebon Contra Kiai Modern* No. 28 Bulan Juni 1932, hlm. 8.

¹⁹ “Verslag Debat Taqlid Di Madrasah Al-Irsjad Gebang No. 9,” *Madjallah Al-Lisan*, 1936.

²⁰ “No Title,” *Madjallah Al-Mawaidz* No. 38, 1936; “No Title,” *Madjallah Al-Lisaan* No. 9, 1936; “No Title,” *Madjallah Tjahya Islam*, No. 28, n.d.

sebagai Kepala Staf *Hizbullah* Cirebon dengan pangkat Letnan Kolonel. Batlyon 6 dipimpin Sumario bermarkas di Arjawinangun.²¹

Berdasarkan uraian di atas, keberadaan NU di Cirebon tidak lepas dari hubungan kekerabatan tradisi keilmuan pesantren dan reaksi aktivitas kelompok Islam modernis. Kiai merupakan tokoh sentral dan selalu identik dengan NU, karena NU lahir melalui proses yang melibatkan kiai. Sementara pesantren sebagai tempat kaderisasi bagi tokoh-tokoh yang kelak akan meneruskan estafet kepemimpinan di NU. Basis NU Cirebon berada di pedesaan dan pesantren antara lain Buntet Pesantren, Pesantren Gedongan yang terletak di sebelah timur. Pesantren Babakan Ciwaringin, Pesantren Balerante, Pesantren Khas Kempek, Pesantren Arjawinangun yang terletak di sebelah Barat.

2. Dari Organisasi Keagamaan ke Partai Politik

Pada Mukktamar NU ke-19 di Paembang 1952, NU keluar dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai partai politik. Status NU menjadi partai politik tentu mengakibatkan NU di tingkat lokal harus mengikuti keputusan PBNU. NU cabang Kabupaten Cirebon misalnya, awalnya mendapat pertentangan dari para anggota NU. Sebagian anggota dan warga NU yang berada di pesantren masih berafiliasi dengan Masyumi. Namun saat itu melalui KH. Mustamid Abbas Komisaris NU cabang Kabupaten Cirebon yang juga putra kedua KH. Muhammad Abbas Abdul Jamil (salah satu tokoh penggerak NU Cirebon) mengikuti keputusan Mukktamar bahwa NU bukan lagi sebagai organisasi keagamaan melainkan partai politik Islam.²²

Pada periode 1953-1955 sejak menjadi partai politik, partai NU Kabupaten Cirebon melaksanakan instruksi PBNU dengan mengadakan program rekrutmen anggota, merekrut orang-orang profesional, membentuk berbagai bidang baru untuk melayani kelompok pendukung seperti buruh dan mahasiswa, dan membangun basis pendanaan yang kuat.²³ Bagi partai NU, langkah ini di ambil sebagai upaya pembenahan diri menghadapi pentas politik di tingkat nasional maupun lokal. Terkait susunan lengkap pengurus NU cabang Kabupaten Cirebon menjelang pemilu 1955 yang beralamat di Jalan Pamitran No. 947 memang belum ditemukan secara pasti. Setidaknya melalui surat PBNU yang ditujukan kepada pengurus NU Kabupaten Cirebon ataupun sebaliknya sekitar persiapan pemilu 1955, saat itu KH. Mustamid Abbas dan KH. Abdul Halim menjabat sebagai

²¹ Dispusip Kabupaten Cirebon, "Sejarah Pemerintahan Kabupaten Cirebon 1942-1955" (Cirebon: Dispusip Kab. Cirebon, 2014), 25.

²² "KH Mustamid Abbas: Pernah Menjual Jasnya Di Pasar No. 21/TH. V/Rabiul Awal 1410 H.," *Warta NU*, 1989.

²³ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, Terj. Fari (Yogyakarta: LKiS, 2003), 136-37.

Komisaris Daerah Cirebon. Sementara pada tahun 1957-1958 Machbub Badjurie sebagai *tanfidziyah*, dan Mahfudz Sirna sebagai Sekretaris NU cabang Kabupaten Cirebon.²⁴

Menindaklanjuti program PBNU dalam menghadapi pemilu 1955, partai NU Kabupaten Cirebon merekrut Machbub Badjurie. Ia adalah pejabat di Departemen Agama Kabupaten Cirebon. Sementara untuk melayani partai, NU bertumpu pada Gerakan Pemuda Ansor dan Muslimat atau Fatayat yang saat itu masih digabung. Kemudian, pada 1958 disusul dengan pendirian Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Pada periode 1960-an berdiri Sarekat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi), Persatuan Petani Nahdlatul Ulama (Pertanu), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. (PMII), Seniman dan Budayawan Muslim Indonesia (Lesbumi).²⁵

B. Partai NU dalam Konstelasi Politik di Kabupaten Cirebon Tahun 1955

Menjelang pemilu pertama 1955, di Cirebon masing-masing partai politik mewacanakan strategi jitu untuk berperan di pentas politik lokal, sehingga tidak heran jika pada masa-masa kampanye terjadi gesekan diantara partai politik terutama partai-partai yang masuk dalam empat besar di Kabupaten Cirebon yaitu NU, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasionalis Indonesia (PNI), dan Masyumi. Secara umum, metode partai peserta pemilu di Cirebon juga sangat beragam. Metode yang digunakan antara lain dengan mendatangkan pimpinan partai dan organisasi, mengadakan pertemuan yang melibatkan pemuda, pengajian atau ceramah umum di lapangan, pemutaran film, perayaan hari besar agama serta pertunjukan kesenian rakyat yang digemari masyarakat Cirebon pada saat itu.²⁶ Berikut gambaran kampanye tiap-tiap partai di Kabupaten Cirebon menjelang pemilu 1955.²⁷

Pertama, PNI. Sebelum bergulirnya pemilu 1955, PNI dianggap sebagai salah satu partai terbesar di Kabupaten Cirebon. PNI menjadikan Konsep Marhaenisme sebagai *platform* dalam melancarkan strategi kampanyenya. PNI juga menganggap bahwa partainya anti terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kedua, PKI. Partai ini menganggap dirinya sebagai partainya rakyat. Hal itu didasari bahwa basis PKI adalah kaum buruh perkotaan dan pedesaan. Dari

²⁴ "Inventaris Arsip NU 1948-1979, Berkas Mengenai Daftar Alamat Anggota PBNU, Daftar Alamat Wilayah/ PCNU, Daftar Alamat-Alamat Neven-Neven NU Tingkat Pusat, Dan Pembaharuan Alamat Wilayah/PCNU Se-Indonesia. (6 Juni 1962 - 12 Desember 1977)" (Jakarta: ANRI, 2015); "Surat Mandat Partai Nahdlatul Ulama Tjbang Kabupaten Tjirebon 9 Maret 1958, No. 416" (Jakarta: ANRI, 2015).

²⁵ Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, "Political Strategy of Nahdlatul Ulama Party in Cirebon Regency during 1952-1967," 82.

²⁶ Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 82-83.

²⁷ Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 82.

gambaran itu, ideologi Marxisme menjadi landasan PKI, sehingga *platform* yang diangkat PKI adalah tentang masalah rakyat. Wacana kampanye PKI hampir dimuat dalam surat kabar Harian Rakyat yang digunakan sebagai alat utama kampanye partai komunis ini. Sebagai tulisan dimuat di surat kabar, bahwa dengan adanya pemilu, bagi PKI ini adalah gerakan politik dari rakyat untuk memperjuangkan nasibnya sendiri.

Ketiga, Partai NU yang di mana pada awal pendirinya sebagai organisasi sosial keagamaan berhaluan *ahl sunnah wa al-jama'ah* menjadikan pendekatan *seduluran* dan agama sebagai *platform* untuk memperoleh suara. Partai dengan basis Islam tradisional di pedesaan dan pesantren tentu menguntungkan, sebab pesantren adalah cara efektif untuk menyebarluaskan pengaruh partai. Selain itu, partai NU juga memiliki pandangan moderat tentang Islam ke-Indonesiaan. Inilah yang kemudian dikembangkan dalam wacana kampanye NU bahwa partainya didirikan untuk memperjuangkan hak umat Islam, melindungi umat Islam, dan masyarakat pada umumnya.

Keempat, Partai Masyumi. Pada awal pembentukannya, Masyumi adalah salah satu partai Islam terbesar di Cirebon dengan basis pendukung dari kalangan pesantren. Namun sejak munculnya NU sebagai partai politik, basis pendukung Masyumi dari pesantren berkurang. Selanjutnya menjelang pemilu 1955, Masyumi menganggap dirinya sebagai partai satu-satunya aspirasi umat Islam. Semboyan yang digelorkan tidak lain demi terlaksanannya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju *ridho illahi*. Identitas keislaman dalam partai ini sangat menonjol, sehingga *platform* Masyumi tidak lepas dari Islam yang bersifat modernis, karena hampir rata-rata pendukung Masyumi berasal dari santri perkotaan.

Suasana menjelang pemilu 1955 dipenuhi dengan poster atau gambar dari masing-masing partai serta lembaran pamflet yang ditempel di transportasi umum, jalanan, bangunan umum, kantor pemerintahan, serta iklan-iklan yang terdapat pada surat kabar, maupun bioskop, antara lain di prapatan Kejaksan, Prujakan, dan Gunung Sari.²⁸ Sementara, masyarakat Cirebon sangat antusias menyambut pemilu dengan ikut bergotong royong membangun Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, masyarakat juga ikut terlibat baik menjadi anggota partai maupun simpatisan partai.²⁹

Oleh sebab itu, demi mencapai penyelenggaraan pemilu yang aman dan tertib maka perlu diadakan kerjasama antar institusi pemerintah maupun institusi di luar pemerintah terutama masyarakat di dalamnya. Melalui Kementerian Dalam

²⁸ "Dispusipda Provinsi Jawa Barat Arsip Audio Visual No. 493" (Dispusipda Provinsi Jawa Barat, 2015).

²⁹ Arsip Nasional Republik Indonesia, "Naskah Sumber Arsip: Jejak Demokrasi Pemilu 1955" (Jakarta: ANRI, 2019), 15–16.

Negeri dan Kementerian Kehakiman Kinerja maka dibutuhkan panitia pemilu untuk mempersiapkan segala bentuk yang berkaitan dengan pemilu. Keputusan itu berdasarkan Undang-undang (UU) No. JB 2/9/3 tanggal 7 Juli 1953, UU No. JB 2/9/4 tanggal 23 April 1953, dan 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953. Isi UU tersebut menetapkan PP (Panitia Pemilu) dibentuk di setiap daerah pemilihan, PPK (Panitia Pemilu Kota/Kabupaten) dibentuk di tingkat kota/kabupaten, dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dibentuk di tingkat kecamatan. Di Cirebon, pembentukan, pelantikan, dan rapat panitia pemilu dilaksanakan antara lain di Palimanan, Lemah Abang, dan Buntet. Sementara sosialisasi pemilu antara lain dilaksanakan di pendopo kawedanan Palimanan dan Pabrik Gula Sindang Laut.³⁰

1. Strategi Partai NU pada Pemilu 1955

Persiapan NU Kabupaten Cirebon menyambut pemilu 1955 berawal sejak keputusan Muktamar NU di Palembang 1952. Saat itu PBNU menginstruksikan untuk segera melakukan pembenahan dalam struktural dengan mengadakan program perekrutan anggota, mendirikan organisasi buruh, mahasiswa dan membangun pendanaan partai. Intruksi ini kemudian dilaksanakan partai NU cabang Kabupaten Cirebon. Pertama, salah satunya merekrut Machbub Badjurie. Ia adalah pejabat di Departemen Agama Kabupaten Cirebon 1953-1955. Pernah menjabat sebagai camat Losari 1949-1950. Ia juga dikenal kepiawanya dalam urusan diplomasi.³¹

Kedua, mengadakan pertemuan untuk membahas pendanaan partai. Melalui *Coperatie Kaoem Moeslimin* (CKM), KH. Abdul Halim Leuwi-munding memberikan arahan kepada pengurus partai terkait usaha-usaha ekonomi. Pertemuan semacam ini terus dilakukan hingga menjelang pemilu 1955.³² Ketiga, *Lajnah Pemilihan Umum* (Lapunu) Wilayah Jawa Barat memberikan sumbangan keuangan sejumlah 2.500 rupiah kepada masing-masing cabang.³³ Keempat, mengadakan Rapat Akbar di Kota Besar Cirebon pada tanggal 3 April 1955 Pukul 20.00 WIB dan dihadiri Ketua Umum PBNU KH. Muhammad Dachlan, Sekretaris Jendral PBNU H. Saifuddin Zuhri, Pengurus Muslimat Murtaziah. Rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk mempersiapkan segala bentuk yang berkaitan dengan pemilu. Selanjutnya berdasarkan surat yang diterima PBNU

³⁰ “Dispusipda Provinsi Jawa Barat Arsip Audio Visual No. 494, 495, 496, 497,” 2019.

³¹ Dispusip Kabupaten Cirebon, *Catatan Singkat Mantan Bupati Cirebon: Machbub Badjurie*. (Cirebon: Dispusip Kabupaten Cirebon, 2000).

³² “Inventaris Arsip NU 1948-1979, Persiapan Rapat-Rapat Ekonomi, No. 681” (Jakarta: ANRI, 2015), 111.

³³ “Inventaris Arsip NU 1948-1979, Sumbangan Keuangan Kepada Tjabang-Tjabang Di Djawa Barat No. 156/Kns.55. 18 Rabiul Awwal 1375 H/3 November 1955 M, No. 77” (Jakarta: ANRI, 2015).

bahwa Wakil Ketua I PBNU KH. Idham Chalid telah menyetujui untuk segera dibentuk dan diadakan Konferensi Lapunu Se-Daerah Karesidenan Cirebon. Maka dibentuk pengurus Lapunu Se-Daerah Cirebon dengan susunan Ketua Ch. Rochmat, Wakil Ketua K. Jasin, Sekretaris Mahfudz Sirna, Keuangan Moch. Azhari, Komisaris Maemunah.³⁴

Sementara itu untuk melayani partai, NU Cabang Kabupaten Cirebon bertumpu pada dua banom yang sudah dibentuk sebelum NU menjadi partai politik yaitu Gerakan Pemuda Ansor dan Muslimat Fatayat (digabung). Meskipun aktivitas kedua Banom tersebut bergerak dalam bidang sosial, namun dua banom ini ikut terlibat dalam pergerakan politik di Kabupaten Cirebon. Kemudian pada 1958 disusul dengan pendirian IPNU, Pertanu, Sarbumusi, dan pada periode 1960-an berdiri PMII, Lesbumi.³⁵

Langkah selanjutnya yaitu menghadirkan tokoh PBNU dan Konsulat partai NU Jawa Barat untuk melakukan kampanye dan ceramah di beberapa tempat di Cirebon, antara lain kunjungan KH. Abdul Halim di Plered pada tanggal 5 Juni 1954, Sekretaris Jendral PBNU H. Saifuddin Zuhri di Ciledug tanggal 6 Juni 1955.³⁶ Penempatan kiai lokal baik di pedesaan maupun pesantren juga patut diperhitungkan. Mereka menggunakan pendekatan kultural yaitu *sedeluruan* dan ceramah agama yang menjadi poin penting untuk menjaring suara pada pemilu 1955. Dalam hal ini, pesantren dan pedesaan menjadi tempat paling efektif untuk menyebarluaskan pengaruh partai dengan memetakan kiai sebagai penggerak massa. Kiai besar yang menjadi tumpuan suara partai NU untuk Kabupaten Cirebon bagian timur antara lain Mustamid Abbas dari Pesantren Buntet, Imam Dimyati dari Pesantren Gedongan. Sementara di sebelah barat Kabupaten Cirebon Ali Kamali dari Pesantren Kempek, Masduki Ali dari Ciwaringin, Abdullah Syatori Arjawinangun.³⁷

Cara kampanye mereka terlihat sederhana dengan mengadakan kegiatan rutin seperti *lailatul ijtima* (semacam pertemuan antar pengurus, anggota NU, warga *nahdliyin*). Kemudian pengajian umum, *tahlilan*, *yasinan* dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi strategi saat kampanye, yaitu ideologi NU berhaluan Islam *ahl sunnah wa al- Jama'ah*, sehingga bagi NU tidak terlalu sulit untuk mengkoordinasikan kegiatan itu berubah menjadi alat kampanye yang

³⁴ "Inventaris Arsip NU 1948-1979, Surat-Surat Mengenai Laporan Pembentukan Kepengurusan Lapunu Dan Persetujuan Mengadakan Konferensi Lapunu Se-Cirebon, No. 1277 (" (Jakarta: ANRI, 2015), 158.

³⁵ Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, "Political Strategy of Nahdlatul Ulama Party in Cirebon Regency during 1952-1967," 86.

³⁶ "Inventaris Arsip NU 1948-1979, Surat-Surat Mengenai Undangan Rapat Akbar Dan Pertemuan PCNU Cirebon, No. 935" (Jakarta: ANRI, 2015), 158.

³⁷ Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, "Political Strategy of Nahdlatul Ulama Party in Cirebon Regency during 1952-1967," 86.

paling efektif. Dukungan itu berubah menjadi suara dalam suksesi pemilu 1955. Biasanya hampir seluruh masyarakat pedesaan dan pesantren akan memilih partai sesuai pilihan kiainya.³⁸

Partisipasi kiai dalam politik terlihat jelas dalam status dan peran mereka sebagai pelindung dan pendukung partai. Belum lagi para pemuda NU yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor juga ikut serta menjadi juru kampanye. Saat itu, juru kampanye NU yang paling disegani adalah Aqil Siradj, berasal dari Gedongan kemudian mengabdikan dirinya di Pesantren Khas Kempek. Karena kepiawaiannya orasi di podium, Aqiel Siradj muda ditunjuk sebagai juru kampanye. Bersama Kiai Ali Kamali, Aqiel Siradj diajak ke pelosok desa untuk menghadiri pengajian rutin. Berangkat dari kesempatan itu, ia berkampanye bahkan daerah yang sebelumnya menjadi basis PNI berubah haluan mendukung NU.³⁹

Kendala partai NU dalam menghadapi pemilu yaitu ketika PKI gencar melakukan propaganda. Di Cirebon, PKI turun ke masyarakat kelas bawah dengan iming-iming pembagian lahan tanah perkebunan dan pertanian. Cara ini cukup berhasil, sebagian warga kemudian mendukung PKI. Seperti kasus yang terjadi di Desa Karang Wareng, Lemah Abang, dan Astanajapura. Informasi tentang peristiwa itu tidak ditemui secara pasti, namun diketahui bahwa daerah-daerah tersebut didominasi simpatisan dan kader PKI. Berawal dari kasus inilah yang kemudian menjadi pemicu konflik antara PKI dan NU di Cirebon periode 1960-an.⁴⁰

Kendala Partai NU selanjutnya yaitu hadirnya Masyumi dengan mengakomodir para kiai pesantren di Cirebon. Masyumi menganggap embrio berdirinya partai ini diawali dengan keterlibatan para kiai pesantren, sehingga diharapkan hadirnya kiai di tengah-tengah masyarakat bisa memobilisasi massa agar mendukung Masyumi. Sebaliknya, NU menganggap bahwa pesantren adalah basis *nahdliyin* bukan golongan Masyumi, karena sejak NU menjadi partai politik para kiai di pesantren di Kabupaten Cirebon sudah berafiliasi dengan NU.⁴¹ Sementara PNI di Kabupaten Cirebon menggunakan aparat pemerintahan sampai ke tingkat desa dengan diiming-iming berupa uang dan diberikan sanksi jika tidak memilih PNI. Perlakuan PNI terhadap aparat desa mengundang respon NU. Sebagai tandingan, NU kemudian menggunakan warga *nahdliyin* yang menjabat

³⁸ Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 86.

³⁹ Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 86–87.

⁴⁰ Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 87. Rofi'i, *Political Strategy of Nahdlatul Ulama*. 87

⁴¹ Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 87.

di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menggunakan kesempatan itu mencari dan membujuk umat muslim untuk mendukung NU.⁴²

2. Hasil Pemilu 1955 di Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang dikenal masyarakatnya heterogen baik sosial, budaya, maupun politik, sehingga tidak salah jika Cirebon menjadi basis suara yang menguntungkan bagi partai peserta pemilu 1955. Pada pemilu 1955 yang diselenggarakan 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante, secara umum berjalan lancar. Perolehan suara pada pemilu 1955 merupakan cerminan keberhasilan masing-masing partai. Persaingan dan kampanye partai politik juga tentu sangat menentukan tingkat keberhasilan partai. Perolehan suara pada pemilu 1955 di Kota maupun Kabupaten Cirebon terpilih empat partai besar. (Lihat Tabel 1 dan 2).

Tabel 1. Jumlah Suara Empat partai besar pada pemilu 1955 di Kota Cirebon

No.	Partai	Jumlah Suara Resmi
1.	PKI	12.665
2.	PNI	9.536
3.	Masyumi	6.255
4.	NU	6.128
Jumlah		34.584

Sumber: Inventaris Arsip NU 1948-1979. No. 2309. ANRI

Tabel 2. Jumlah Suara Empat partai besar pada pemilu 1955 di Kabupaten Cirebon

No.	Partai	Jumlah Suara Resmi
1.	NU	105.317
2.	PKI	70.143
3.	PNI	63.720
4.	Masyumi	46.261
Jumlah		222.504

Sumber: Inventaris Arsip NU 1948-1979. No. 2309. ANRI

Berdasarkan hasil pada tabel 1. Dan 2. di atas, partai NU cabang Kota Cirebon menempati urutan ke empat dengan perolehan 6.128 suara. Sementara urutan pertama ditempati PKI dengan 12.665 suara, PNI 9.536 suara, Masyumi 6.255 suara. Meskipun Kota Cirebon adalah basis PKI, jauh berbeda di Kabupaten

⁴² Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 87.

Cirebon, Partai NU keluar sebagai pemenang dan satu-satunya partai NU di Jawa Barat yang meraih hasil gemilang.⁴³ Kemenangan NU tidak lepas dengan adanya jaringan pesantren di Kabupaten Cirebon. Peran serta pengaruh para kiai yang berada di wilayah pedesaan dan pesantren sangat didominasi oleh masyarakat tradisional yang kemudian berafiliasi dengan NU, sehingga sangat mudah mendapat dukungan suara. Jika dipetakan, jaringan pesantren Kabupaten Cirebon memang sangat strategis antara lain di sebelah timur terdapat dua pesantren terkemuka yaitu Pesantren Gedongan dan Buntet. Di ujung barat, Pesantren Ciwaringin, Kempek, Balerante dan bagian utara arah Indramayu terdapat pesantren Arjawinangun.⁴⁴

Herber Feith menyebutkan bahwa hampir rata-rata pemilih partai NU berasal kalangan pesantren dan pedesaan, di mana kiai mempunyai prinsip *solidarity maker*, yaitu sebagai pemersatu di antara masyarakat.⁴⁵ Selain itu, banyak masyarakat pedesaan yang memilih NU dengan anggapan bahwa partai NU adalah partainya para kiai (*NU kih partae para kiai*). Berangkat dari argumentasi itu, banyak para pemilih partai NU memandang jika ikut dengan kiai maka akan mendapatkan keberkahan selamat daripada ikut dengan partai lain.⁴⁶ Oleh karena itu, kapabilitas dan otoritas kiai di pesantren dan pedesaan di Kabupaten Cirebon sangatlah kuat. Hampir masyarakat Kabupaten Cirebon sangat menghormati para ulama-kiai, sehingga jika seorang kiai mengatakan "*enggih*" maka para pengikutnya pun dengan sendirinya akan patuh. Dalam konteks kehidupan sosial-keagamaan, Cirebon dikenal sebagai masyarakat santri. Dengan demikian, sangat jelas bahwa hadirnya ulama-kiai di tengah-tengah masyarakat menunjukkan pengaruh kiai begitu besar termasuk dalam urusan politik.

Setelah pemilu 1955 diselenggarakan untuk pemilihan DPR maka utusan partai NU Kabupaten Cirebon yaitu KH. Mustamid Abbas Buntet berturut-turut menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) Tingkat I Jawa Barat periode 1956-1967 dan 1967-1971. Berikut riwayat perjuangan, organisasi, dan pekerjaan Kiai Mustamid; Kepala Penerangan *Hizbullah* Batalyon II Regu II Divisi RH tahun 1945-1947, Kepala Penerangan III/B.NI/XIII Divisi Siliwangi tahun 1947-1948, Ketua partai Masyumi Astanajapura 1943-1947, Ketua *tanfidziyah* atau Komisaris NU Daerah Cirebon

⁴³"Inventaris Arsip NU 1948-1979, Surat-Surat Mengenai Hasil Pemilu 1955,1971, Dan 1977 Dibeberapa Daerah, No. 2309 (" (Jakarta: ANRI, 2015), 375.

⁴⁴ Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, "Political Strategy of Nahdlatul Ulama Party in Cirebon Regency during 1952-1967," 84.

⁴⁵ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (New York: Equinox, 2006), 234.

⁴⁶ Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, "Political Strategy of Nahdlatul Ulama Party in Cirebon Regency during 1952-1967," 85.

tahun 1952-1955, merangkap sebagai Ketua *tanfidziyah* dan ketua bidang dakwah NU Cabang Kabupaten Cirebon tahun 1956-1957, Pembantu Menteri Muda Penghubung Kabinet Alim Ulama Daerah Jawa Barat tahun 1959, Kepala Departemen BKS-Ulama-Militer bagian keamanan Kabupaten Cirebon tahun 1960, anggota Konsulat partai NU Jawa Barat tahun 1957-1960, Ketua Lembaga Pendidikan Islam Buntet Pesantren 1960-1965, *rois syuriah* NU Jawa Barat tahun 1967-1977 dan Penasihat Pusat *Rabithah Ma'ahid Islamiyah* Indonesia tahun 1967-1977.⁴⁷

Selain KH. Mustamid, setelah partai NU meraih kemenangan pada pemilu 1955, muncul Machbub Badjuire yang diangkat sebagai Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Cirebon sekaligus ketua *tanfidziyah* NU cabang Kabupaten Cirebon tahun 1957-1958. Anggota DPRD-GR Kabupaten Cirebon, anggota BPH Kabupaten Cirebon 1966 dan terakhir sebagai Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan Kabupaten Cirebon tahun 1996 atau sekarang disebut BAPPEDA.⁴⁸

Kesimpulan

NU telah mengalami transformasi selama kurun waktu 1952-1967. NU tampil sebagai kelompok politisi yang kurang berpengalaman. Strategi NU baik di tingkat nasional maupun lokal pada periode 1950-1960-an membuktikan keseriusan NU untuk meraih suara di pemilu 1955. Perilaku NU merupakan campuran antara sikap akomodatif dan militan, tergantung pada kondisi yang dihadapi. Di mana para aktor yaitu kiai lokal menjadi penggerak massa baik dalam urusan keagamaan maupun politik. Kajian ini telah mengungkap sejumlah fakta tentang jejak NU Kabupaten Cirebon periode 1931-1955. Meskipun perilaku NU sering dipandang akomodatif, oportunistis, namun ini adalah cara mereka memenuhi kewajiban utama yaitu mengupayakan berkembangnya agama Islam yang terangkum dalam empat *madzhab* dan dapat diterapkan di masyarakat agar umat Islam dapat beribadah dengan bebas dan penuh ketaatan. Dengan kata lain bahwa NU selalu mengedepankan politik kebangsaan.

⁴⁷ "Sekretariat Kabinet RI, Buku Lengkap IV Pemilihan Umum 1977, Ringkasan Riwayat Hidup Dan Riwayat Perjuangan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilihan Umum 1977 (" (Jakarta: Sekretariat Kabinet RI, 1977), 567-68.

⁴⁸ Dispusip Kabupaten Cirebon, *Catatan Singkat Mantan Bupati Cirebon: Machbub Badjuire* (Cirebon: Dispusip Kabupaten Cirebon, 2000).

Daftar Sumber

- Anam, Choirul. *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: PT. Duta Aksara Mulia, 2010.
- “Catatan Singkat Kongres N.O. Ke-4 Di Semarang 1929 Dalam Berita LINO No. 6 Awal Juli,” 1971.
- “Catatan Singkat Tentang Muktamar N.O Ke-6,” n.d.
- Cirebon, Dispusip Kabupaten. *Catatan Singkat Mantan Bupati Cirebon: Machbub Badjurie*. Cirebon: Dispusip Kabupaten Cirebon, 2000.
- . “Sejarah Pemerintahan Kabupaten Cirebon 1942-1955.” Cirebon: Dispusip Kab. Cirebon, 2014.
- “Dispusipda Provinsi Jawa Barat Arsip Audio Visual No. 493.” 2015.
- “Dispusipda Provinsi Jawa Barat Arsip Audio Visual No. 494, 495, 496, 497,” 2019.
- Emalia, Imas. “Dinamika Gerakan Sarekat Islam (SI) Cirebon Dalam Kongres Al-Islam I 1922.” *Buletin Al-Turats* 14, no. 1 (2008): 57–74. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-turats/article/view/4256>.
- . “Penghulu Dan Kyai Di Karesidenan Cirebon: Semangat Keberagaman Dan Berpolitik Pada Awal Abad Ke-20.” *Jurnal Al-Turats* 12, no. 2 (2006).
- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Terj. Fari. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. New York: Equinox, 2006.
- Hasan, Ahmad Zaini. *Perlawanan Dari Tanah Pengasingan: Kiai Abbas, Pesantren Buntet Dan Bela Negara*. Yogyakarta: Lkis, 2014.
- Hasan, Ahmad Zaini. *Perlawanan Dari Tanah Pengasingan: Kiai Abbas Pesantren Buntet Dan Bela Negara*. Yogyakarta: Lkis, 2014.
- Indonesia, Arsip Nasional Republik. “Naskah Sumber Arsip: Jejak Demokrasi Pemilu 1955.” Jakarta: ANRI, 2019.
- “Inventaris Arsip NU 1948-1979, Berkas Mengenai Daftar Alamat Anggota PBNU, Daftar Alamat Wilayah/ PCNU, Daftar Alamat-Alamat Neven-Neven NU Tingkat Pusat, Dan Pembaharuan Alamat Wilayah/PCNU Se-Indonesia. (6 Juni 1962 - 12 Desember 1977).” Jakarta: ANRI, 2015.
- “Inventaris Arsip NU 1948-1979, Persiapan Rapat-Rapat Ekonomi, No. 681.” Jakarta: ANRI, 2015.
- “Inventaris Arsip NU 1948-1979, Sumbangan Keuangan Kepada Tjabang-Tjabang Di Djawa Barat No. 156/Kns.55. 18 Rabiul Awwal 1375 H/3 November 1955 M, No. 77.” Jakarta: ANRI, 2015.
- “Inventaris Arsip NU 1948-1979, Surat-Surat Mengenai Hasil Pemilu 1955,1971, Dan 1977 Dibeberapa Daerah, No. 2309 (.” Jakarta: ANRI, 2015.
- “Inventaris Arsip NU 1948-1979, Surat-Surat Mengenai Laporan Pembentukan Kepengurusan Lapunu Dan Persetujuan Mengadakan Konferensi Lapunu Se-Cirebon, No. 1277 (.” Jakarta: ANRI, 2015.
- “Inventaris Arsip NU 1948-1979, Surat-Surat Mengenai Undangan Rapat Akbar Dan Pertemuan PCNU Cirebon, No. 935.” Jakarta: ANRI, 2015.
- “Jejak Muhammadiyah Cirebon 2: Dari Garut Menyebar Ke Cirebon.” *Aktualita*

- No. 3. Cirebon, 2012.
- “KH Mustamid Abbas: Pernah Menjual Jasnya Di Pasar No. 21/TH. V/Rabiul Awal 1410 H.” *Warta NU*, 1989.
- Lubis, Nina Herlina. *Sejarah Perkembangan Islam Di Jawa Barat*. Bandung: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2011.
- “No. 8 Dan 9 Tahun Ke-3.” *Madjallah Swara N.O.*, n.d.
- “No Title.” *Madjallah Tjahya Islam*, No. 28, n.d.
- “No Title.” *Madjallah Al-Mawaidz* No. 38, 1936.
- “No Title.” *Madjallah Al-Lisaan* No. 9, 1936.
- “Pemberitahuan Mukhtamar N.O Ke-VI,” n.d.
- Pijfer, G.F. *Pragmenta Islamica: Beberapa Studi Mengenal Islam Di Indonesia Awal XIX*. Edited by Tudjimah Tudjimah. Jakarta: UI Press, 1987.
- Rofi'i, Ahmad Faiz, Yety Rochwulaningsih, and Alamsyah Alamsyah. “Political Strategy of Nahdlatul Ulama Party in Cirebon Regency during 1952-1967.” *Indonesian Historical Studies* 6, no. 1 (2022): 78–93. <https://doi.org/10.14710/ihis.v6i1.13267>.
- “Sekretariat Kabinet RI, Buku Lengkap IV Pemilihan Umum 1977, Ringkasan Riwayat Hidup Dan Riwayat Perjuangan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilhan Umum 1977 (.” Jakarta: Sekretariat Kabinet RI, 1977.
- Sujati, Budi. *Sejarah Nahdaltul Ulama Jawa Barat*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- “Surat Mandat Partai Nahdlatul Ulama Tjabang Kabupaten Tjirebon 9 Maret 1958, No. 416.” Jakarta: ANRI, 2015.
- “Verslag Congres N.O. Jang Ke-14 Di Kota Magelang, 1/2-6/7 1939.7.,” n.d.
- “Verslag Congres N.O. Jang Ke-15 Di Kota Surabaya, 9 Februari 1940.14,” n.d.
- “Verslag Congres N.O. Jang Ke-XIII Di Kota Menes Banten, 11/12-16/17 Juni 1938.144,” n.d.
- “Verslag Debat Taqlied Di Madrasah Al-Irsjad Gebang No. 9,” *Madjallah Al-Lisan*, 1936.